

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip *good and clean governance* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 terhadap kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) *good and clean governance* sudah diterapkan/diimplementasikan di Kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan asas sebagai berikut: a) Kepastian Hukum, b) Kemanfaatan, c) Ketidakberpihakan, d) Kecermatan, e) Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, f) Keterbukaan, g) Kepentingan Umum, dan h) Pelayanan yang Baik.
2. Pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terutama Pasal 10 Tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini dapat memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro

Pihak Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disarankan agar terus meningkatkan pelayanan publik yang menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance* atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) agar pelayanan terhadap masyarakat lebih memuaskan.

2. Kepada pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro

Setiap pegawai, terutama di Bagian Umum Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk meningkatkan disiplin, integritas, profesionalitas, serta kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi agar pelaksanaan tugas administrasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussamad. (2021). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Zifatama Publishing.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press.
- HR, R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- HR, R. (2023). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Irawanto. (2025). *Good Governance: Konsep, Prinsip, dan Implementasi*. Zahir Publishing.
- Kasmir. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mushafi. (2025). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. CV. Eureka Media Aksara.
- Priansa. (2022a). *Manajemen Pelayanan Prima*. Alfabeta.
- Priansa, D. J. (2022b). *Komunikasi Pemasaran Terpadu pada Era Media*. Pustaka Setia.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Rahmadana & Fitri, M. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Ridwan, J., & Sudrajat, S. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia.
- Rivai, V. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik*. Raja Grafindo Persada.

Sarinah, M. D., & Harmaini. (2021). *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Deepublish.

Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Deepublish.

Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher.

Widiarty, W. S. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Universitas Kristen Indonesia.

B. Jurnal

Engkus, & Azan, A. R. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1).

Marwan, A., & Julianthy, E. M. (2024). Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 1(1).

Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip Good Governance di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1(1), 40–52.

Rosyada, A. A. (2020). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 102–114.

Solechan. (2019). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3).

Yuliantari, K., & Ulfa, S. N. (2021). Disiplin Kerja Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada PT. Mega Bangun Baja Semesta. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 1(1).

C. Website

Admin. (2021). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. <https://Mh.Uma.Ac.Id>. [https://mh.uma.ac.id/asas-asas-umum-pemerintah-yang-baik/#:~:text=Asas-asas umum pemerintahan yang baik \(AUPB\) adalah,dengan standar pelayanan%2C dan ketentuan peraturan perundang-undangan](https://mh.uma.ac.id/asas-asas-umum-pemerintah-yang-baik/#:~:text=Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) adalah,dengan standar pelayanan%2C dan ketentuan peraturan perundang-undangan)

Priscilla, J. (2025). *Apa Itu Asas Umum Pemerintahan yang Baik? Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukumnya.* Hukumku.Id. <https://www.hukumku.id/post/asas-umum-pemerintahan-yang-baik?>

D. Artikel

Indymadjid, R.Z. (2024). Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Hukum Acara. *Artikel Kampus*, 1(4) Edisi Juli.

Shadiq, A.S. & Budhiartie, A. (2025). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Good Governance. *Artikel Tambusai*, 9(1) Edisi Mei.

Widjiastuti, A. (2017). Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN. *Artikel Perspektif*, 22(2), Edisi Mei.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terutama Pasal 10 Tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)